

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024-2026



**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2023**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarokatuh,

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dapat tersusun.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026 yang disusun pada masa kekosongan Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai suatu Dokumen Perencanaan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif. Selain itu RENSTRA merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar hingga tahun 2026.

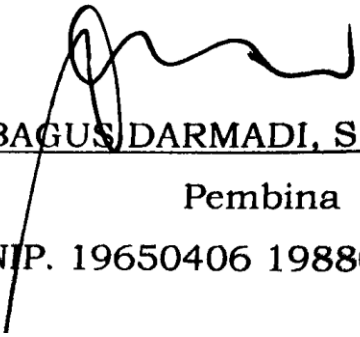
Dengan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi kemajuan Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Karanganyar.

Kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya, serta memberikan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Aamiin.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarokatuh.

Karanganyar, 19 April 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



BAGUS DARMADI, S.H., M.M.
Pembina
NIP. 19650406 198803 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I	I-1
PENDAHULUAN	I-1
I.1. Latar Belakang	I-1
I.2. Landasan Hukum	I-3
I.3. Maksud dan Tujuan.....	I-7
I.4. Sistematika Penulisan.....	I-8
BAB II.....	II-10
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-10
II.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-10
II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-18
II.2.1. Sumber Daya Manusia.....	II-18
II.2.2. Sumber daya fisik (sarana dan prasarana)	II-20
II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-23
II.4. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II-46
II.5. Kelompok Kerja Tambahan	II-49
II.6. Kelompok Sasaran Layanan	II-51
II.7. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-52
BAB III.....	III-54
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-54
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-54
III.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPD	III-57
III.3. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-59
BAB IV.....	IV-62
TUJUAN DAN SASARAN	IV-62
IV.1. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	IV-62
IV.1.1. Tujuan.....	IV-62
IV.1.2. Sasaran	IV-63
IV.2. POHON KINERJA DAERAH	IV-65
IV.3. POHON KINERJA PERANGKAT DAERAH	IV-65

BAB V.....	V-68
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-68
V.1. STRATEGI.....	V-68
V.2. KEBIJAKAN.....	V-68
BAB VI.....	VI-71
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	VI-71
BAB VII.....	VII-93
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-93
BAB VIII.....	VIII-96
P E N U T U P.....	VIII-96

DAFTAR TABEL

Tabel II- 1 Data Pegawai BPBD Kabupaten Karanganyar	II-19
Tabel II- 2 Data PNS menurut pangkat/golongan	II-19
Tabel II- 3 Data PNS menurut kualifikasi pendidikan	II-20
Tabel II- 4 Data Jabatan Struktural	II-20
Tabel II- 5 Data Sarana Prasarana dan Aset BPBD	II-21
Tabel II- 6 Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Kecamatan	II-25
Tabel II- 7 Jumlah Kerusakan dan Kerugian serta Korban Bencana di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022	II-25
Tabel II- 8 Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Karanganyar berdasarkan jenis kejadian	II-26
Tabel II- 9 Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Karanganyar	II-27
Tabel II- 10 Pencapaian Kinerja Pelayan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023	II-28
Tabel II- 11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2018-2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar	II-30
Tabel II- 12 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) BPBD Tahun 2018-2022	II-48
Tabel III-1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-56
Tabel IV-1 <i>Cascading</i> Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.....	IV-64
Tabel V-1 Strategi dan Kebijakan	V-69
Tabel VI-1 Rencana Program dan Pendanaan Indikatif BPBD Karanganyar Tahun 2024-2026	VI-76
Tabel VII-1 Indikator Kinerja Utama BPBD.....	VII-94
Tabel VII-2 Indikator Kinerja Program BPBD	VII-95

DAFTAR GAMBAR

Gambar I- 1 Gambaran keterkaitan Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar dengan Dokumen Perencanaan lainnya.....	I-2
Gambar I- 2 Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten.....	I-2
Gambar II- 1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar	II-18
Gambar II- 2 Peta Rawan Bencana di Kabupaten Karanganyar	II-23

BAB I

PENDAHULUAN

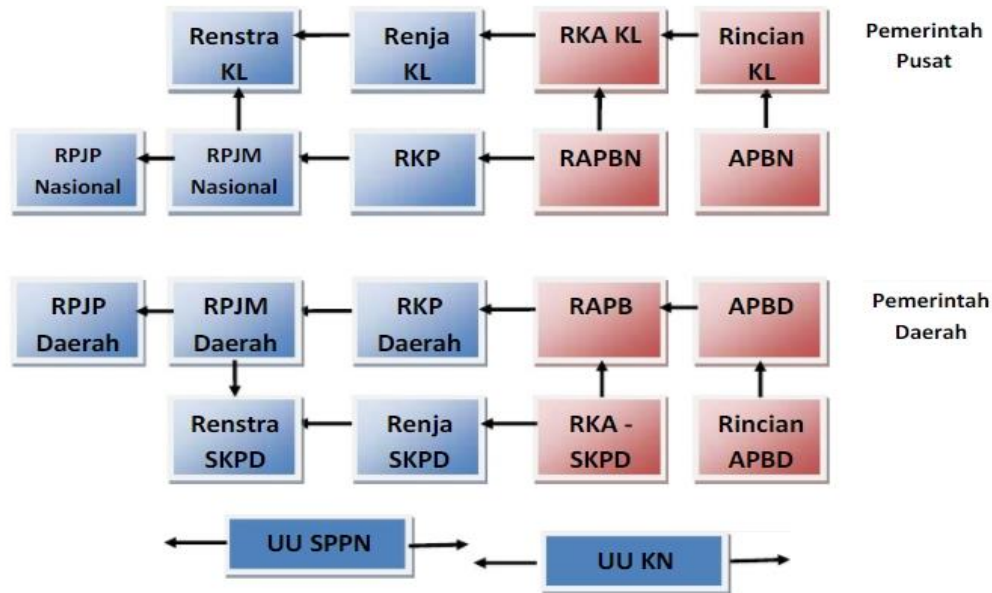
I.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 merupakan amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyusun perencanaan strategis yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra. Dokumen Renstra BPBD Tahun 2024-2026 adalah penjabaran teknis dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang disusun oleh daerah di masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024 dikarenakan telah habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar pada tahun 2023.

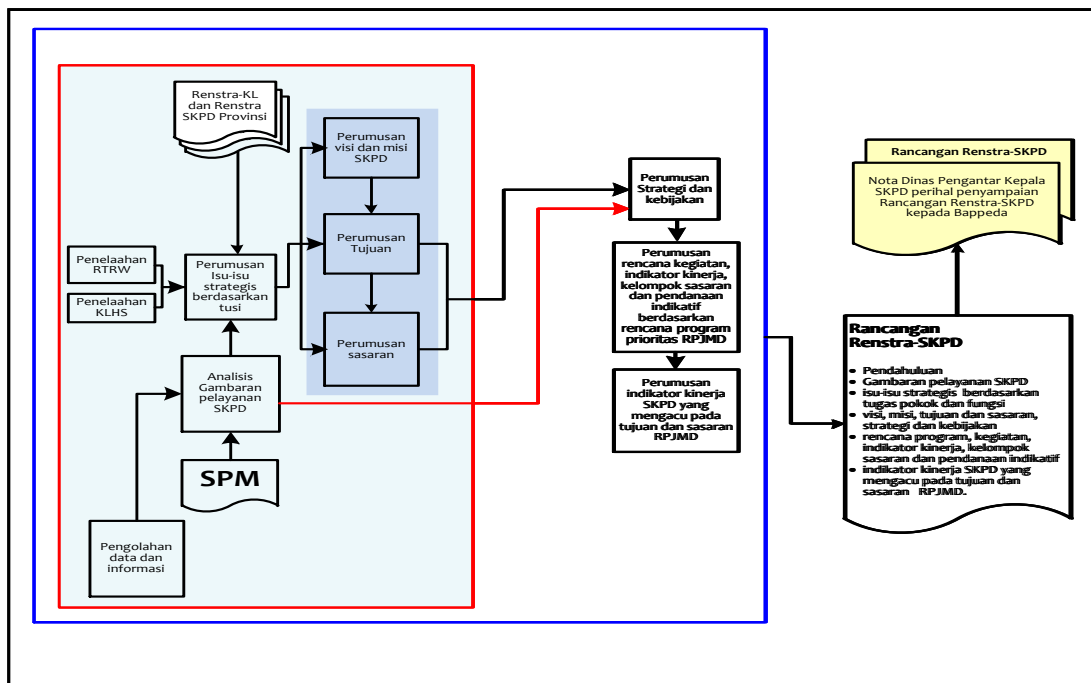
Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun kedepan (2024-2026) yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten. Gambaran keterkaitan Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar dengan Dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar I-1.



Gambar I- 1 Gambaran keterkaitan Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Adapun Tahapan penyusunan rancangan Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar dapat digambarkan dalam Gambar 1-2. dibawah ini.



Gambar I- 2 Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten

Renstra perangkat daerah ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja menjadi pedoman untuk penyusunan RKA SKPD yang mengacu

pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis karena selain menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

- Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar adalah menyediakan dokumen perencanaan SKPD yang selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BPBD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Karanganyar.

Tujuan dari penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar yaitu sebagai berikut:

- 1) Agar arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan/permasalahan yang dihadapi daerah.
- 2) Agar tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Karanganyar untuk kurun waktu 3 tahun kedepan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kondisi riil.

- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur BPBD Kabupaten Karanganyar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya), dan Kelompok Sasaran Layanan.

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan capaian kinerja Perangkat daerah pada Bab II dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah.

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat tentang Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rincian rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, beserta kinerja, indikator, target dan pagunya.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas pokok, yaitu:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan Bupati bidang penanggulangan bencana;
- b. menetapkan pedoman dan rencana kerja terhadap pelaksanaan kebijakan dalam usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- c. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- e. menetapkan prosedur tetap penanganan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. merumuskan kebutuhan anggaran rencana kerja dan pelaksanaan anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- g. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; dan
- h. melakukan tindakan cepat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan rencana kerja penanggulangan bencana daerah dan penanganan pengungsi;

- b. koordinasi pengintegrasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pengkoordinasian mobilisasi sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah;
- d. pengendalian penggunaan anggaran dan barang yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah;
- e. pengendalian dalam pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang; dan
- f. pemberian komando dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan bencana daerah.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah berasal dari Perangkat Daerah terkait, pakar dan tokoh masyarakat.

3. Unsur Pelaksana.

Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah;
- d. Pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah;
- e. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas kesekretariatan, pencegarah dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana;
- g. Pengelolaan kesekretariatan unsur pelaksana; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unsur Pelaksana terdiri dari :

a. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar bertugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar. Kepala Pelaksana membawahi sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik dan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar, mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan tugas penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- 2) menyusun kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) merumuskan pedoman dan rencana kerja terhadap pelaksanaan kebijakan dalam usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- 4) merumuskan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) menyusun bahan penetapan dan informasi peta rawan bencana dan peta evakuasi;
- 6) merumuskan prosedur tetap penanganan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) menyusun kebutuhan anggaran rencana kerja dan pelaksanaan anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- 8) mempersiapkan bahan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah kepada Bupati setiap bulan

sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- 9) melaksanakan tindakan cepat yang diperintahkan atasan terkait penanggulangan bencana daerah.
- 10) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah yang dikuasakan oleh Kepala BPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 11) mengumpulkan dan menyalurkan bantuan uang dan barang;
- 12) menyusun bahan perencanaan strategis BPBD sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar agar dapat digunakan sebagai acuan kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi;
- 13) mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- 14) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; dan
- 15) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan tugas pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dan rencana kerja penanggulangan bencana daerah dan penanganan pengungsi;
- 2) pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan

penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 3) pengkoordinasian kegiatan penanggulangan bencana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
 - 4) pengkomandoan penanggulangan bencana melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Kerja lainnya, Instansi Vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
 - 5) pelaksanaan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - 6) pengendalian teknis pelaksanaan bidang penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
 - 7) pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terhadap tugas-tugas kesekretariatan, pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - 8) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana;
 - 9) pengelolaan kesekretariatan unsur pelaksana;
 - 10) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
- b. Kepala Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Tugas pokok Kepala Sekretariat adalah membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya serta kerjasama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - 2) pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - 3) pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - 4) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - 5) pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
 - 6) pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
 - 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
- c. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- 1) perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - 2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - 3) pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - 4) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
- d. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik

Dalam melaksanakan tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- 1) perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- 2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
- 3) pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- 4) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- 5) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik; dan
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

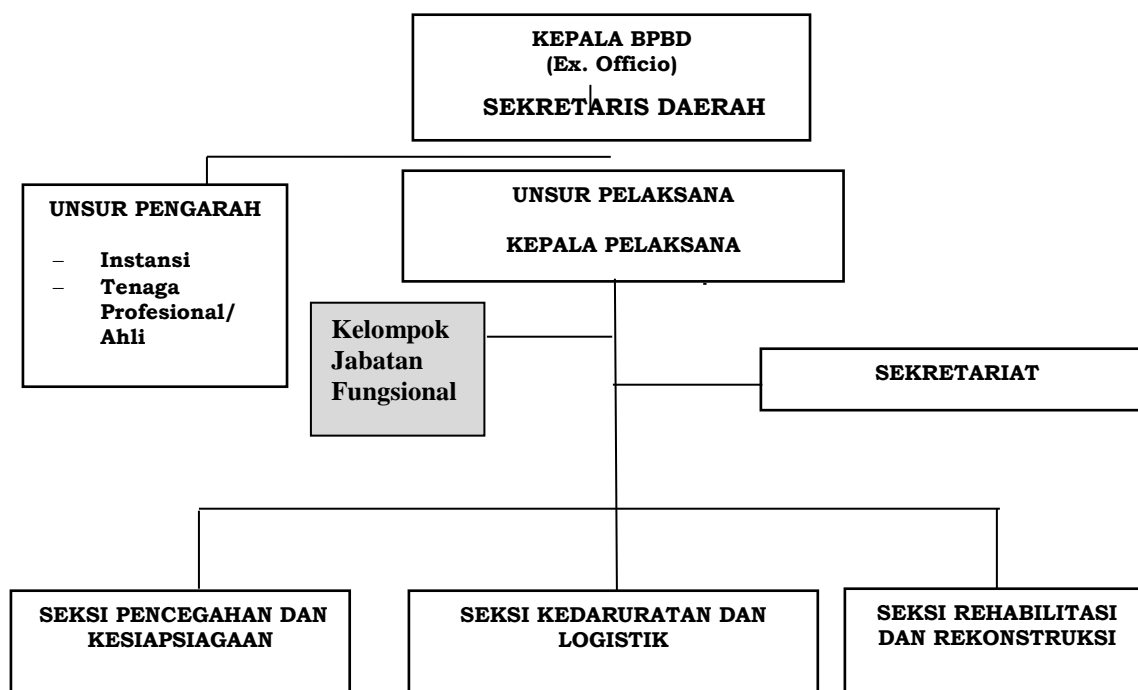
e. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dalam melaksanakan tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- 1) perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana;
- 2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- 3) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- 4) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

(Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011)



Gambar II- 1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar

II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya meliputi dua aspek yakni aspek sumber daya manusia dan sumber daya fisik (sarana dan prasarana).

II.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar terdiri dari 19 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 44 orang Tenaga Harian Lepas (THL)/satgas. Spesifikasi PNS pada BPBD adalah sebagai berikut : pendidikan S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 8 orang, D3 sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 6 orang dan SLTP sebanyak 1 orang. PNS yang menduduki jabatan struktural adalah 1 orang eselon III dan 4 orang eselon IV.

Gambaran kondisi kepegawaian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar, terinci sebagai berikut :

1. Data Pegawai

Tabel II- 1 Data Pegawai BPBD Kabupaten Karanganyar

NO	TAHUN	JUMLAH PEGAWAI		KET
		PNS	THL	
1	Tahun 2018	17	40	
2	Tahun 2019	21	42	
3	Tahun 2020	20	42	
4	Tahun 2021	18	42	
5	Tahun 2022	19	45	

2. Data pangkat/golongan Pegawai Negei Sipil PNS

Tabel II- 2 Data PNS menurut pangkat/golongan

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pembina Tk I (IV/b)	1	1	1	1	-
2	Pembina (IV/a)	1	2	3	2	3
3	Penata Tk I (III/d)	6	5	3	4	5
4	Penata (III/c)	-	1	1	1	-
5	Penata Muda (III/a)	-	3	3	3	4
6	Pengatur Tk. I (II/d)	2	2	5	3	2
7	Pengatur (II/c)	4	4	1	1	2
8	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	1	2	1	2
9	Pengatur Muda (II/a)	2	1	-	1	-
10	Juru (I/c)	1	1	1	1	1

3. Data tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil

Tabel II- 3 Data PNS menurut kualifikasi pendidikan

NO	PENDIDIKAN PNS	2018	2019	2020	2021	2022
1	Strata 2 (S2)	5	4	4	3	3
2	Strata 1 (S1)/Diploma IV (D.IV)	3	7	7	8	8
3	Diploma III	-	-	-	-	1
3	SLTA/Sederajat	8	8	8	7	7
4	SLTP/Sederajat	1	1	1	-	-

4. Data pejabat struktural

Tabel II- 4 Data Jabatan Struktural

NO	ESELON	JUMLAH	KET.
1	Eselon III.a	1 orang	
2	Eselon IV.a	4 orang	

II.2.2. Sumber daya fisik (sarana dan prasarana)

Untuk mendukung kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar tidak terlepas dari kebutuhan sarana prasarana.

Sarana prasarana yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar terdiri dari :

- a. Tanah Perkantoran seluas 6.560 m² yang di atasnya dibangun Gedung kantor yang terdiri dari Ruang kerja pimpinan, ruang kerja seksi, ruang pertemuan dan 1 (satu) unit Gudang.
- b. Sarana dan prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II- 5 Data Sarana Prasarana dan Aset BPBD
Kabupaten Karanganyar**

No	Nama Barang	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi
1	Kendaraan roda empat	7	7	7	7	10	Baik
2	Kendaraan roda dua	10	11	11	11	11	Baik
3	Kendaraan roda enam	1	1	1	1	1	Baik
4	Perahu Karet	6	6	6	6	6	Baik
5	Komputer	9	11	11	11	11	Baik
6	Laptop	8	10	10	10	10	Baik
7	Printer	7	11	11	11	11	Baik
8	LCD Proyektor	1	2	2	2	2	Baik
9	Printer scanner F4	2	3	3	3	3	Baik
10	CCTV	0	2	2	2	2	Baik
11	Jaringan LAN	2	2	2	2	2	Baik
12	Tenda Posko	2	2	2	2	2	Baik
13	Tenda Pleton	6	6	6	6	6	Baik
14	Tenda Regu/Pengungsi	2	2	2	2	2	Baik
15	Tenda Keluarga	6	6	6	6	6	Baik
16	Portable Generating Set	9	9	9	9	9	Baik
17	Mesin Gergaji (chaisaw)	14	14	14	14	14	Baik
18	Rak Besi	8	8	8	8	8	Baik
19	Lemari Besi	17	17	17	17	17	Baik
20	Rak Kayu	1	1	1	1	1	Baik
21	Lemari Kaca	5	5	5	5	5	Baik
22	Lemari Kayu	1	1	1	1	1	Baik
23	Meja Rapat	10	16	16	16	16	Baik
24	Meja ½ Biro	17	17	17	17	17	Baik
25	Meja Staff	22	22	22	22	22	Baik
26	Filling Cabinet	5	11	11	11	11	Baik
27	Kursi Tamu	1	1	1	1	2	Baik
28	Kursi Kerja Eselon III	1	1	1	1	1	Baik
29	Kursi Kerja Eselon IV	4	4	4	4	4	Baik
30	Televisi	3	3	3	3	3	Baik
31	Pesawat Telepon	1	1	1	1	1	Baik
32	Faximili	1	1	1	1	1	Baik
33	Camera	3	3	3	3	3	Baik
34	Handycam	3	3	3	3	3	Baik
35	Dispenser	8	8	8	8	8	Baik
36	Kipas Angin	20	20	20	20	20	Baik
37	AC	6	10	10	10	10	Baik

No	Nama Barang	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi
38	Sound System	5	5	5	5	5	Baik
39	Light Tower	1	1	1	1	1	Baik
40	Megaphone	3	3	3	3	3	Baik
41	Pesawat HT	20	20	20	20	20	Baik
42	Pesawat Portable RIG UHF	2	2	2	2	2	Baik
43	Kursi Staff	8	8	8	8	8	Baik
44	Mesin Tempel	7	7	7	7	7	Baik
45	Alcone	6	6	6	6	6	Baik
46	Tabung Selam	2	2	2	2	2	Baik
47	Breathing Appartus	2	2	2	2	2	Baik
48	Electric Hammers	1	1	1	1	1	Baik
49	Alat pemotong baja/beton	2	2	2	2	2	Baik
50	Compressor selam	-	-	-	-	1	Baik
51	Early Warning System	10	10	10	10	10	Baik

c. Ruang dan peralatan PUSDALOPS sebanyak 1 unit.

d. Media Informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi berupa :

- Instagram : @bpbdkaranganyar
- Facebook : BPBD Kabupaten Karanganyar
- Twitter : @BPBD_Kra
- Whatsapp : 08112637243
- Website : www.bpbd.karanganyarkab.go.id
- E-mail : bpbdkaranganyar@gmail.com

e. Arsip sebagai pendukung pelaksanaan pekerjaan.

Selain data peralatan dan aset tersebut, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar juga terdapat persediaan logistik berupa kebutuhan dasar yang dibutuhkan untuk korban bencana.

Logistik tersebut antara lain adalah kebutuhan pangan, sandang, kebutuhan untuk kesehatan, kebutuhan untuk tempat pengungsian dan peralatan dapur umum.

II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun dengan maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dapat lebih terarah, secara administratif dapat memenuhi persyaratan, dapat dipertanggungjawabkan dan dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang terbatas. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran, sehingga tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Kondisi Kabupaten Karanganyar yang berpotensi terjadi bencana perlu perhatian dan kewaspadaan dari berbagai kalangan baik pemerintah maupun non pemerintah. Potensi bencana di Kabupaten Karanganyar antara lain adalah banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem berupa angin kencang/puting beliung, kekeringan dan kebakaran. Berikut merupakan Peta Rawan Bencana Kabupaten Karanganyar.

Gambar II- 2 Peta Rawan Bencana di Kabupaten Karanganyar



Sehubungan dengan kejadian bencana di Kabupaten Karanganyar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar telah melakukan upaya-upaya penanganan bencana sebagai berikut :

1. Pencegahan dan kesiapsiagaan, melalui kegiatan :
 - 1) Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota;
 - 2) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana);
 - 3) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota;
 - 4) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
 - 5) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 6) Gladi Penanggulangan Bencana;
 - 7) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
 - 8) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
 - 9) Penyusunan Rencana Kontijensi;
 - 10) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
 - 11) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.
2. Penanganan Darurat dan Logistik, melalui sub kegiatan:
 - 1) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/kota;
 - 2) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
 - 3) Respon Cepat Kejadian Luar biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas; dan
 - 4) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan.
3. Rehabilitasi dan rekonstruksi, melalui sub kegiatan:
 - 1) Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota.

Adapun data terkait bencana alam di Karanganyar selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2018-2022 disajikan dalam tabel-tabel di bawah ini:

Tabel II- 6 Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Kecamatan

NO.	LOKASI	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kec. Karanganyar	16	17	9	10	12
2.	Kec. Jaten	8	8	4	11	6
3.	Kec. Kebakramat	5	15	5	4	8
4.	Kec. Tasikmadu	12	13	9	7	5
5.	Kec. Mojogedang	6	11	8	8	6
6.	Kec. Karangpandan	24	12	11	16	14
7.	Kec. Matesih	5	21	13	18	11
8.	Kec. Tawangmangu	16	11	9	15	17
9.	Kec. Ngargoyoso	29	14	27	24	28
10.	Kec. Kerjo	5	8	8	13	11
11.	Kec. Jenawi	15	9	15	10	12
12.	Kec. Jumantono	6	9	8	6	10
13.	Kec. Jumapolo	9	13	12	17	10
14.	Kec. Jatipuro	7	8	7	6	4
15.	Kec. Jatiyoso	28	13	8	13	19
16.	Kec. Colomadu	6	11	4	1	4
17.	Kec. Gondangrejo	17	13	7	10	4
	Jumlah	213	206	164	189	181

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Karanganyar, 2022.

Tabel II- 7 Jumlah Kerusakan dan Kerugian serta Korban Bencana di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kerusakan (Rp)	4.008.192.066	1.542.807.610	4.061.980.850	4.409.180.850	4.908.180.850
2	Kerugian (Rp)	2.375.010.000	315.295.000	759.681.500	826.634.000	1.727.870.500

3	Kerusakan + Kerugian (Rp)	6.383.202.066	1.858.102.610	4.821.662.350	5.235.814.850	6.636.397.785
4	Jumlah Korban Bencana	864	717	362	582	1083

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Karanganyar, 2022.

Tabel II- 8 Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Karanganyar berdasarkan jenis kejadian

No	Jenis Kejadian	Banyaknya Kejadian				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angin Ribut	37	64	23	40	40
2	Banjir	8	3	3	5	5
3	Kebakaran	55	69	34	43	23
4	Pergerakan Tanah	1	1	0	1	0
5	Rumah Roboh	19	17	18	16	14
6	Tanah Longsor	93	52	86	84	99
	TOTAL	213	206	164	189	181

Sumber : BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Kejadian bencana alam selama 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Karanganyar yang tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 213 kejadian. Jenis kejadian bencana terbesar adalah kejadian tanah longsor yaitu sebanyak 99 kejadian dan terjadi pada tahun 2022. Sedangkan kerusakan dan kerugian akibat bencana alam terbesar juga terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp.6.636.397.785,- (enam milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) dengan jumlah korban terdampak bencana sebanyak 1.083 (orang atau KK). Jumlah korban terdampak bencana tahun 2022 ini adalah yang terbesar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Persentase Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana.

Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Karanganyar yang sudah dibentuk pada awal periode Renstra 2018-2023 adalah 3 (tiga) desa atau 1,69 % dan pada tahun 2022 jumlah desa

Tangguh bencana yang terbentuk menjadi 18 desa atau 10,17%. Destana yang terbentuk selain didanai oleh APBD Kabupaten Karanganyar juga didanai oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah dan juga Study Campus. Data Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sampai dengan tahun 2022 di Kabupaten Karanganyar disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel II- 9 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Karanganyar

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Tahun	Ancaman	Sumber Dana	Keterangan
1	Jenawi	Balong	2015	Tanah Longsor	APBD Prov	BPBD Prov Jateng
2	Ngargoyoso	Berjo	2015	Tanah Longsor	APBD Prov	BPBD Prov Jateng
3	Tawangmangu	Tawangmangu	2016	Tanah Longsor	APBD Prov	BPBD Prov Jateng
4	Karangpandan	Gerdu	2019	Tanah Longsor	APBD Prov	BPBD Prov Jateng
5	Karangpandan	Karangpandan	2019	Tanah Longsor	APBD Prov	BPBD Prov Jateng
6	Kerjo	Plosorejo	2019	Tanah Longsor	APBD Kab	BPBD Kab Karanganyar
7	Kerjo	Gempolan	2019	Tanah Longsor	APBD Kab	BPBD Kab Karanganyar
8	Jenawi	Menjing	2020	Tanah Longsor	APBD Kab	BPBD Kab Karanganyar
9	Ngargoyoso	Nglegok	2020	Tanah Longsor	APBD Kab	BPBD Kab Karanganyar
10	Jatioso	Karangsari	2020	Tanah Longsor	APBD Kab	BPBD Kab Karanganyar
11	Jatioso	Wonorejo	2022	Tanah Longsor	APBD Kab	BPBD Kab Karanganyar
12	Gondangrejo	Dayu	2022	Banjir	APBD Kab	BPBD Kab Karanganyar
13	Ngargoyoso	Kemuning	2021	Tanah Longsor	Sumber Lain	KKN UNS
14	Ngargoyoso	Ngargoyoso	2021	Tanah Longsor	Sumber Lain	KKN UNS
15	Ngargoyoso	Girimulyo	-	Tanah Longsor	Sumber Lain	KSB
16	Matesih	Koripan	2021	Tanah Longsor	Sumber Lain	MBKM UNS
17	Jatioso	Wukirsawit	-	Tanah Longsor	Sumber Lain	SIBAT
18	Tawangmangu	Tengklik	-	Tanah Longsor	Sumber Lain	SIBAT

Data Capaian Indikator tujuan, sasaran dan program untuk periode Renstra tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel II- 10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	Tujuan																
	% berkurangnya korban bencana (Korban Meninggal, Korban Luka, Korban Harta)	%	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,08	0,04	0,06	0,12	0,00	87,5	150	100	41,7	0,00
II.	Sasaran																
1	% Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	%	2,82	4,52	4,52	6,78	9,03	2,82	4,52	5,65	10,17	0,00	100	100	125	150	0.00
2	Nilai SAKIP	%	na	65	65,5	66	67	63,08	65,21	70,52	66	0,00	0	100,3	107,6	na	0.00
III.	Program																
a	Persentase pelayanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	00	100	100	100	100	0.00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
b	Persentase Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	2,82	4,52	4,52	6,78	9,03	2,82	4,52	6,17	10,17	0,00	100	100	100	100	0,00
c	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,00	100	100	100	100	0,00
d	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana	%	na	0,75	0,76	0,78	0,80	na	0,75	0,75	0,79	0,00	na	100	98,7	101,28	0,00

Berdasarkan sasaran/target Renstra 2018 – 2023, anggaran dan realisasi pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dituangkan dalam tabel II-11 dibawah ini.

Tabel II- 11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2018-2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar

PROGRAM/ KEGIATAN RKPD PERMENDAGRI 13	PROGRAM/ KEGIATAN RKPD VERSI PERMENDAGRI 90	Anggaran pada Tahun (000)					Realisasi Anggaran pada tahun (000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	387.610	874.900	561.000	328.700	614.300	362.177,515	821.089,419	533.567,244	302.624,703	580.582,714	90,9	94,0	91,9	94,4	90,72
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>															
Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	10.000	5.000	5.000	1.500	3.000	6.602	4.470	3.978	1.494	2.700	66,02	89,40	79,56	99,60	90,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.000	76.000	80.000	75.000	93.000	39.220,335	58.906,801	61.242,998	58.055,953	76.479,592	87,16	77,51	76,55	77,41	82,24
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>															
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, dan	96.425	324.600	232.000	141.160	291.500	83.951,550	291.928,025	229.664,300	140.907,500	289.455,500	87,06	89,93	98,99	99,82	99,30

PROGRAM/ KEGIATAN RKPD PERMENDAGRI 13	PROGRAM/ KEGIATAN RKPD VERSI PERMENDAGRI 90	Anggaran pada Tahun (000)					Realisasi Anggaran pada tahun (000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
dinas/operasional	perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan															
	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	34.865,20	25.000	25.000	15.000	15.000	32.720	24.950	25.000	14.998,750	14.820,600	93,85	99,80	100,00	99,99	98,80
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.419,80	20.000	15.000	11.000	12.000	21.715,500	20.000	14.928	10.930	11.618,200	96,86	100,00	99,52	99,36	96,82
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000	3.000	3.000	2.000	3.000	1.956,800	3.000	2.545	2.000	3.000	97,84	100,00	84,83	100,00	100,00
Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	-	2.000	8.000	3.000	10.000	-	2.000	7.980	3.000	6.897,900	-	100,00	99,75	100,00	68,98
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	3.000	3.000	2.640	2.800	-	2.565	2.580	2.365	2.150	-	85,50	86,00	89,58	76,79
Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.700	121.000	70.000	39.900	184.000	33.420	118.080	65.670	34.240	173.460,922	99,17	97,59	93,81	85,81	94,27
		143.200	295.300	120.000	37.500		142.591,330	295.189,593	119.978,946	34.633,500		99,57	99,96	99,98	92,36	
-	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	6.500	-	-	-	-	6.500	-	-	-	-	100,00

PROGRAM/ KEGIATAN RKPD PERMENDAGRI 13	PROGRAM/ KEGIATAN RKPD VERSI PERMENDAGRI 90	Anggaran pada Tahun (000)					Realisasi Anggaran pada tahun (000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota															
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Pengadaan kendaraan dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	30.000	-	-	-	-	23.100	-	-	-	-	77,00	-	-	-
Pembangunan Gedung Kantor	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	4.300.000	3.500.000	-	200.000	2.629.203,500	4.440	3.032.209	-	199.500	87,64	0,10	86,63	-	99,75
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-	-	70.500	-	111.250	-	-	70.148	-	107.875	-	-	99,50	-	96,97
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		-	176.095	125.000	-		174.775	124.610	-	-		99,25	99,69	-		
Pengadaan Peralatan Operasional		-	32.880	79.000	-		27.420	72.225	-	-		83,39	91,42	-		
Pengadaan Mebeleur	Pengadaan Mebel	-	-	75.000	-	10.000	-	-	71.336	-	10.000	-	-	95,11	-	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															

PROGRAM/ KEGIATAN RKPD PERMENDAGRI 13	PROGRAM/ KEGIATAN RKPD VERSI PERMENDAGRI 90	Anggaran pada Tahun (000)					Realisasi Anggaran pada tahun (000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)										
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)						
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	15.000	5.000	75.000	5.000	45.000	14.950	4.900	49.696	5.000	44.954	99,67	98,00	66,26	100,00	99,90						
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan mebel	10.000	15.000	10.000	-	-	9.930	14.918	-	-	-	99,30	99,45	-	-	-						
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	-	-	10.000	21.000	51.205	14.590	19.945	14.985	18.730	44.721,400	99,25	99,73	99,90	89,19	87,34						
Pemeliharaan Komputer		14.700	20.000	15.000													13.250	24.875	9.000	99,62	99,50	90,00
Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi		13.300	25.000	10.000													38.770	30.000	99,92	100,00		
Pemeliharaan Peralatan Operasional		-	38.800	30.000																		
Program peningkatan disiplin aparat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															-						
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	80.000	38.500	-	71.500	-	78.656	37.776,200	-	70.850,000	-	98,32	98,12	-	99,09						
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																					
	Administrasi Kepegawaian																					

PROGRAM/ KEGIATAN RKPD PERMENDAGRI 13	PROGRAM/ KEGIATAN RKPD VERSI PERMENDAGRI 90	Anggaran pada Tahun (000)					Realisasi Anggaran pada tahun (000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Perangkat Daerah															
Pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya	66.075	75.000	-	-	194.485	64.730	74.770	-	-	193.513,526	97,96	99,69	-	-	99,50
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										-	-	-	-	-	-
Penyusunan Renstra OPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	40.000	-	-	-	-	36.012	-	-	-	-	90,03	-	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000	-	-	-	-	3.650	-	-	-	-	73,00	-	-	-	-
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (SKPD)	-	10.625	-	-	-	-	8.790	-	-	-	-	82,73	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN RKPD PERMENDAGRI 13	PROGRAM/ KEGIATAN RKPD VERSI PERMENDAGRI 90	Anggaran pada Tahun (000)					Realisasi Anggaran pada tahun (000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Penatausahaan Keuangan	-	105.000	-	-	-	-	98.975	-	-	-	-	94,26	-	-	-	-
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Program Penanggulangan Bencana	1.990.612	2.433.325	2.397.505	7.575.900	3.580.120	1.895.784,128	2.306.834,794	2.227.188,556	7.434.716,200	3.164.789,280	94,8	96,1	86,8	98,14	88,40
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana														-	-
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-	155.000	-	-	-	-	149.220	-	-	-	-	96,27
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	50.000	50.000	35.000	99.350	115.000	49.869,778	46.184,800	34.552,500	94.285,230	113.046,500	99,74	92,37	98,72	94,90	98,30
Sosialisasi Penanggulangan Bencana	(Per Jenis Bencana)	-	50.000	60.000	25.000		-	47.000	60.000	25.000		-	94,00	100,00	100,00	
	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana															
Gladi Penanggulangan Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50.000	50.000	-	-	90.000	48.600	48.000	-	-		97,20	96,00	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN RKPD PERMENDAGRI 13	PROGRAM/ KEGIATAN RKPD VERSI PERMENDAGRI 90	Anggaran pada Tahun (000)					Realisasi Anggaran pada tahun (000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pendampingan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian (DaLA)	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	-	20.000	20.000	-	122.000	-	18.939	5.150	-	-	-	94,70	25,75	-	-
Pelatihan Teknis Penilaian dan Kerugian DALA/PDNA		-	50.000	50.000	-		-	49.000	50.000	-	-	-	98,00	100,00	-	-
Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Korban Bencana		-	50.000	-	-		-	50.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	1.250					978,200					78,26
Pelatihan Relawan Bencana Alam	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	-	125.000	75.000	100.250	160.000	-	120.500	74.440	97.051	160.000	-	96,40	99,25	96,81	100,00
Pembentukan/Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	70.000	150.000	-	100.000	-	70.000	149.580	-	97.092,900	-	100,00	99,72	-	97,09
Managemen Pengelolaan Logistik dan Management Pergudangan	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	-	-	20.000	-	2.500			16.125		1.642,080			80,63	-	65,68
Pengelolaan PUSDALOPS		-	-	10.000	2.500				6.644,316	1.324,000					66,44	
Pengadaan sarana dan Prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-	-	25.000					20.500					82,00	-	

PROGRAM/ KEGIATAN RKPD PERMENDAGRI 13	PROGRAM/ KEGIATAN RKPD VERSI PERMENDAGRI 90	Anggaran pada Tahun (000)					Realisasi Anggaran pada tahun (000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pengadaan EWS		-	-	100.000	-			-	100.000				-	100,00	-	
Pembuatan Jalur Evakuasi Bencana dan Titik Kumpul		15.000	10.540	-			13.200	10.000	-			88,00	94,88	-	-	
	Penyusunan Rencana Kontijensi	-	-	-	-	150.000					149.350					99,57
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	-	-	-	-	1.250					1.000					80,00
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana															
	Respon Cepat Kejadian Luar biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	-	-	-	5.845.000	-				5.772.609	-				98,76	-
Peningkatan Penanganan Bencana	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/kota	1.475.612	1.827.785	1.652.505	1.353.800	1.694.370	1.389.494,350	1.721.380,994	1.515.724,240	1.298.008,800	1.610.462,600	94,16	94,18	91,72	95,88	95,05
Pengadaan Logistik untuk korban bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-	200.000	100.000	225.000	-	-	194.472,500	96.439,000	222.594,000	-	-	97,24	96,44	98,93
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat bencana	-	-	-	-	4.000	-	-	-	-	3.592,000	-	-	-	-	89,80

PROGRAM/ KEGIATAN RKPD PERMENDAGRI 13	PROGRAM/ KEGIATAN RKPD VERSI PERMENDAGRI 90	Anggaran pada Tahun (000)					Realisasi Anggaran pada tahun (000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana															
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1.250					1.000,000					80,00
	Penguatan kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-	10.000					10.000,000					100,00
Fasilitasi Penanganan Bencana	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	120.000	-	50.000	746.000		115.950	-	50.000	643.500	-	96,63	-	100, 00	86,26
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	-	-	-	-	1.000					-					-
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	1.500					1.311					87,40
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi																
Pengelolaan/Pem eliharaan Website		-	10.000	-	-	-	-	9.880	-	-	-	-	98,80	-	-	-
Program Pembangunan																

PROGRAM/ KEGIATAN RKPD PERMENDAGRI 13	PROGRAM/ KEGIATAN RKPD VERSI PERMENDAGRI 90	Anggaran pada Tahun (000)					Realisasi Anggaran pada tahun (000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	2021	(17)
Infrastruktur Perdesaan																
Pembangunan Talud Lingkungan		200.000	-	-		-	198.828	-	-	-	-	99,41	-	-	-	-
Pembangunan Jembatan Lingkungan		200.000	-	-		-	195.792	-	-	-	-	97,90	-	-	-	-
JUMLAH		2.378.222	3.308.225	2.958.505	7.904.600	4.194.420	2.257.961,643	3.127.924,213	2.760.755,800	7.737.340,903	3.745.371,994					-

Lanjutan Tabel II- 12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2018-2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar

Program/Kegiatan RKPD PERMENDAGRI 13	Program / Kegiatan RKPD Versi PERMENDAGRI 90	Pertumbuhan Anggaran									Pertumbuhan Realisasi					Keterangan
		Penambahan/Pengurangan Anggaran Dibandingkan Tahun sebelumnya (000)				Prosentase Penambahan/Pengurangan Anggaran Dibandingkan Tahun sebelumnya				Rata/Rata Prosentase	Penambahan/Pengurangan Realisasi Dibandingkan Tahun sebelumnya				Rata/Rata Prosentase	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022		
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
Program pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	487.290	313.900	-232.300	285.600	126%	-36%	-41%	87%	34%	3,10	-2,10	2,50	0,11	0,90	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	-5.000	0	-3.500	1.500	-50%	0%	-70%	100%	-5%	23,38	-9,84	20,04	-9,60	6,00	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	31.000	4.000	-5.000	18.000	69%	5%	-6%	24%	23%	-9,65	-0,96	0,86	4,83	-1,23	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	228.175	-92.600	-90.840	150.340	237%	-29%	-39%	107%	69%	2,87	9,06	0,83	-0,52	3,06	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-9.865	0	-10.000	0	-28%	0%	-40%	0%	-17%	5,95	0,20	-0,01	-1,19	1,24	

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-2.420	-5.000	-4.000	1.000	-11%	-25%	-27%	9%	-13%	3,14	-0,48	-0,16	-2,54	-0,01	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.000	0	-1.000	1.000	50%	0%	-33%	50%	17%	2,16	-15,17	15,17	0,00	0,54	
Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	2.000	6.000	-5.000	7.000		300%	-63%	233%	118%	100,00	-0,25	0,25	-31,02	17,25	Kegiatan baru di tahun 2019
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000	0	-360	160		0%	-12%	6%	-1%	85,50	0,50	3,58	-12,79	19,20	Kegiatan baru di tahun 2019
Penyediaan makanan dan minuman	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.300	-51.000	-30.100	144.100	259%	-42%	-43%	361%	134%	-1,58	-3,78	-8,00	8,46	-1,23	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		152.100	-	-82.500	-37.500	106%	-59%	-69%	-100%	-30%	0,39	0,02	-7,62	-92,36	-24,89	
-	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD				6.500											Kegiatan Baru di Tahun 2022
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota															
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Pengadaan kendaraan dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000	-30.000	0	0		-100%			-25%	77,00	-77,00	0,00	0,00	0,00	Kegiatan untuk pemenuhan saran prasarana sangat tergantung kebutuhan sarana prasarana. Jumlah anggaran sangat fluktuatif
Pembangunan Gedung Kantor	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.300.000	-	-	200.000	43%	-19%	-		-19%	-87,54	86,53	-86,63	99,75	3,03	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	0	70.500	-70.500	111.250			-		-25%	0,00	99,50	-99,50	96,97	24,24	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		176.095	-51.095	-125.000	0		-29%	-		-32%	99,25	0,44	-99,69	0,00	0,00	
Pengadaan Peralatan Operasional		32.880	46.120	-79.000	0		140%	-		10%	83,39	8,03	-91,42	0,00	0,00	
Pengadaan Mebeleur		Pengadaan Mebel	0	75.000	-75.000	10.000			-		-25%	0,00	95,11	-95,11	100,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	-10.000	70.000	-70.000	40.000	-67%	1400%	-93%	800%	510%	-1,67	-31,74	33,74	-0,10	0,06	Fluktuatif tergantung kebutuhan

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan mebel	5.000	-5.000			50%	-33%	0%		4%	0,15	-99,45	0,00	0,00	-24,83	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	0	10.000	11.000	30.205			110%	144%	63%	0,00	91,50	-2,31	-1,85	21,84	
Pemeliharaan Komputer		5.300	-5.000	-15.000	0	36%	-25%	100%		-22%	0,48	0,17	-99,90	0,00	-24,81	
Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi		11.700	-15.000	-10.000	0	88%	-60%	100%		-18%	-0,12	-9,50	-90,00	0,00	-24,91	
Pemeliharaan Peralatan Operasional		38.800	-8.800	-30.000	0		-23%	100%		-31%	99,92	0,08	100,00	0,00	0,00	
Program peningkatan disiplin aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80.000	-41.500	-38.500	71.500		-52%	100%		-38%	98,32	-0,20	-98,12	99,09	24,77	Fluktuatif tergantung ketersediaan anggaran
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
Pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya	8.925	-75.000	0	194.485	14%	-100%			-22%	1,73	-99,69	0,00	99,50	0,39	Fluktuatif tergantung ketersediaan anggaran
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Penyusunan Renstra OPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000	-40.000	0	0		-100%			-25%	90,03	-90,03	0,00	0,00	0,00	Muncul ketika masa penyusunan Renstra

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-5.000	0	0	0	-	100%				-25%	-73,00	0,00	0,00	0,00	-18,25
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (SKPD)	-	-10.625	0	0	0	-	100%				-25%	-82,73	0,00	0,00	0,00	-20,68
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Penatausahaan Keuangan	-	-105.000	0	0	0	-	100%				-25%	-94,26	0,00	0,00	0,00	-23,57
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Program Penanggulangan Bencana	442.713	-35.820	5.178.395	3.995.780	-	22%	-1%	216%	-53%	46%	1,30	-9,30	11,34	-9,74	-1,60
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	0	0	0	0						0%			0,00	0,00	
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0	155.000						0%	0,00	0,00	0,00	96,27	24,07
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	0	-15.000	64.350	15.650	0%	-30%	184%	16%	42%	-7,37	6,35	-3,82	3,40	-0,36	
Sosialisasi Penanggulangan Bencana		50.000	10.000	-35.000	-25.000		20%	-58%	-100%	-35%	94,00	6,00	0,00	100,00	0,00	
	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana															
Gladi Penanggulangan Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0	-50.000	0	90.000	0%	-100%				-25%	-1,20	-96,00	0,00	0,00	-24,30
Pendampingan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian (DaLA)	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	20.000	0	-20.000	122.000		0%	-	100%		-25%	94,70	-68,95	-25,75	0,00	0,00

Pelatihan Teknis Penilaian dan Kerugian DALA/PDNA		50.000	0	-50.000	0		0%	100%		-25%	98,00	2,00	100,00	0,00	0,00	
Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Korban Bencana		50.000	-50.000	0	0		-100%			-25%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	0	0	0	1.250					0%	0,00	0,00	0,00	78,26	19,57	
Pelatihan Relawan Bencana Alam	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	125.000	-50.000	25.250	59.750		-40%	34%	60%	13%	96,40	2,85	-2,44	3,19	25,00	
Pembentukan/Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	70.000	80.000	-150.000	100.000		114%	100%		4%	100,00	-0,28	-99,72	97,09	24,27	
Managemen Pengelolaan Logistik dan Management Pergudangan	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	0	20.000	-20.000	2.500			100%		-25%	0,00	80,63	-80,63	65,68	16,42	
Pengelolaan PUSDALOPS		0	10.000	-7.500	-2.500			-75%	-100%	-44%	0,00	66,44	-13,48	-52,96	0,00	
Pengadaan sarana dan Prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0	25.000	-25.000	0			100%		-25%	0,00	82,00	-82,00	0,00	0,00	
Pengadaan EWS		0	100.000	-100.000	0			100%		-25%	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Pembuatan Jalur Evakuasi Bencana dan Titik Kumpul		-4.460	-10.540	0	0	-30%	-100%			-32%	6,88	-94,88	0,00	0,00	-22,00	
	Penyusunan Rencana Kontijensi	0	0	0	150.000					0%	0,00	0,00	0,00	99,57	24,89	Kegiatan hanya 1 kali
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	0	0	0	1.250					0%	0,00	0,00	0,00	80,00	20,00	
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Respon Cepat Kejadian Luar biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	0	0	5.845.000	5.845.000				-100%	-25%	0,00	0,00	98,76	-98,76	0,00	
Peningkatan Penanganan Bencana	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/kota	352.173	175.280	-298.705	340.570	24%	-10%	-18%	25%	5%	0,02	-2,46	4,16	-0,83	0,22	

Pengadaan Logistik untuk korban bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	200.000	-100.000	125.000			-50%	125%	19%	0,00	97,24	-0,80	2,49	24,73	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat bencana	0	0	0	4.000					0%	0,00	0,00	0,00	89,80	22,45	Kegiatan baru di tahun 2022
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0	1.250					0%	0,00	0,00	0,00	80,00	20,00	
	Penguatan kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0	10.000					0%	0,00	0,00	0,00	100,00	25,00	
Fasilitasi Penanganan Bencana	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	120.000	-120.000	50.000	696.000			-100%	1392%	323%	96,63	-96,63	100,00	-13,74	21,57	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	0	0	0	1.000					0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0	0	0	1.500					0%	0,00	0,00	0,00	87,40	21,85	
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pengelolaan/Pemeliharaan Website		10.000	-10.000	0	0			-100%		-25%	98,80	-98,80	0,00	0,00	0,00	
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pembangunan Talud Lingkungan		-200.000	0	0	0	-100%				-25%	-99,41	0,00	0,00	0,00	-24,85	
Pembangunan Jembatan Lingkungan		-200.000	0	0	0	-100%				-25%	-97,90	0,00	0,00	0,00	-24,48	
JUMLAH		930.003	-349.720	4.946.095	3.710.180	39%	-11%	167%	-47%	37%	-0,39	-1,23	4,57	-8,59	-1,41	

Interpretasi terhadap tabel II-10 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada sub I Tujuan yakni % berkurangnya korban bencana (Korban meninggal, korban luka, korban harta)
Target Kinerja Pelayanan BPBD pada point ini yakni mencapai rasio seminimal mungkin timbulnya korban akibat bencana. Rasio korban dari tahun ke tahun ditargetkan semakin menurun. Sebagaimana dalam Target Renstra Tahun 2018-2023, target antara Tahun 2019-2023 berturut-turut yakni 0,07;0,06;0,06;0,05;0,05 sedangkan pencapaian kinerja berturut-turut yakni 0,08;0,04;0,06;0,012 untuk tahun 2023 belum dapat diukur capaiannya. Dari perbandingan capaian dan target dapat digambarkan bahwa pada tahun 2019 terjadi kasus yang melebihi dari target dan merupakan sebuah kinerja yang kurang baik karena tidak mampu menekan korban akibat bencana. Melihat pada pengalaman di tahun 2019 maka kemudian BPBD melakukan berbagai upaya dan hasilnya dapat dilihat bahwa capaian tahun 2020, 2021, dan 2022 jumlah korban dapat ditekan. Bahkan pada tahun 2022 rasio korban sangat kecil yakni hanya 0,012.
- b. Pada sub II Sasaran yakni % Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
Target kinerja Pelayanan BPBD pada point ini yakni mencapai Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di seluruh desa/kelurahan se-Kabupaten Karanganyar yakni 177 desa/kelurahan. Target Sebagaimana dalam Target Renstra Tahun 2018-2023, target antara Tahun 2019-2023 jumlah desa/kelurahan yang menyandang predikat Desa/kelurahan Tangguh Bencana berturut-turut 5 desa, 8 desa, 8 desa, 12 desa dan 15 desa. Tahun 2020 ke tahun 2021 tidak terjadi peningkatan mengingat adanya refocusing anggaran guna penanganan COVID-19. Dari target tersebut dapat dicapai berturut-turut yakni 5 desa, 8 desa, 10 desa dan 18 desa untuk tahun 2023 belum dapat diukur capaiannya. Dari perbandingan tersebut maka dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan pada sub II telah cukup baik, akan tetapi hal ini masih perlu ditingkatkan mengingat dari 177 desa/kelurahan baru 18 desa/kelurahan yang berstatus Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui penambahan anggaran atau hibauan ke desa/kelurahan agar mencanangkan Desa/kelurahan Tangguh bencana menggunakan anggaran masing-masing desa.
Pada capaian nilai SAKIP dapat dilihat bahwa capaian kinerja BPBD selalu melampaui target.
- c. Pada sub III Program yakni Persentase pelayanan informasi rawan bencana, dan Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan BPBD telah baik. Setiap tahun mampu memenuhi target yang ditetapkan.
Pada Persentase Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, indicator ini adalah menggunakan indicator terbentuknya desa/kelurahan Tangguh bencana. Sehingga identic pada sub II Sasaran yakni % Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
Pada capaian IKD dapat dilihat bahwa capaian kinerja BPBD sempat turun di tahun 2021 akan tetapi kemudian bisa naik kembali di tahun 2022.

II.4. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Sedangkan mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. BPBD sebagai *leading sector* penanganan bencana di daerah melaksanakan 3 (tiga) Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota yang meliputi:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Informasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada Warga Negara agar diketahui ancaman bencana yang dapat terjadi dan membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu;

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana;

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu; dan

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana;

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana oleh karena itu dibutuhkan

upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin. Target untuk 3 (tiga) jenis pelayanan dasar di atas adalah 100% pertahun.

Adapun capaian SPM pada tahun 2018-2022 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel II- 13 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) BPBD Tahun 2018-2022

No	Jenis Pelayanan	Formulasi	Satuan	Capaian				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana / Jumlah warga negara di daerah Rawan Bencana x 100%	%	na	na	100	100	100
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana/Jumlah warga negara di daerah rawan bencana x 100 %	%	na	na	100	100	100
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana/Jumlah korban bencana yang harus memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana x 100%	%	na	na	100	100	100

II.5. Kelompok Kerja Tambahan

a. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* Kabupaten Karanganyar

Sebagai OPD yang menangani Penanggulangan Bencana BPBD juga turut serta aktif dalam Penanggulangan Bencana Pandemi *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* Kabupaten Karanganyar di Kabupaten Karanganyar. Melalui Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 360/1201 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* Kabupaten Karanganyar, BPBD Kabupaten Karanganyar mendukung Sekretariat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* Kabupaten Karanganyar. Tugas Sekretariat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* Kabupaten Karanganyar yakni :

- Melaksanakan pengurusan surat-menyurat Satuan Tugas Penanganan *COVID-19*
- Melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan
- Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan *COVID-19*
- Memproses dokumen-dokumen bersifat legal (perjanjian kerjasama, surat edaran, protokol, dokumen perizinan dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan *COVID-19*
- Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan penanganan *COVID-19*
- Melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan *COVID-19*

b. Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana maka harus dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Karanganyar. FPRB dimaksudkan sebagai wadah untuk menyampaikan saran dan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana.

Tujuan Pembentukan FPRB adalah :

- Mendorong kegiatan koordinasi PRB yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di Daerah
 - Mendorong kerjasama yang efektif antar pemangku kepentingan dalam kegiatan PRB di daerah
 - Meningkatkan partisipasi dan memfasilitasi semua pemangku kepentingan terhadap upaya pengarusutamaan PRB ke dalam perencanaan, kebijakan dan program pembangunan di Daerah
 - Mendorong pelebagaan dan mengarusutamakan PRB ke dalam perencanaan, kebijakan pembangunan Daerah
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan perencanaan pembangunan yang tidak berpengarusutamaan PRB atau bertentangan dengan upaya PRB
 - Mendorong partisipasi aktif multi pihak antara forum dengan pemangku kepentingan, perencana, pelaku dan pengambil keputusan pembangunan dalam upaya PRB
 - Membangun dan meningkatkan hubungan antar pelaku PRB
- Dalam susunan Kepengurusan FPRB Kabupaten Karanganyar, BPBD Kabupaten Karanganyar bertindak selaku salah satu Dewan Pembina, menugaskan salah satu pejabat sebagai Sekretaris dan salah satu Staf sebagai Bendahara

c. Kerjasama Penanggulangan Bencana di Wilayah Subosukawonosraten.

Berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana dalam satu wilayah berdekatan antar kabupaten/kota di wilayah eks

Karasidenan Surakarta maka dilaksanakan kerjasama yang tercantum dalam sebuah naskah Perjanjian Kerjasama Penanggulangan Bencana di Wilayah Subosukawonosraten yang meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten. Maksud kerjasama ini adalah untuk meningkatkan koordinasi, sinergi dan kesiapsiagaan dalam pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan penanggulangan bencana di wilayah Subosukawonosraten, sedangkan tujuan kerjasama ini adalah meningkatkan pelaksanaan tugas dan kewenangan para pihak dalam penanggulangan bencana di wilayah Subosukawonosraten secara cepat, terorganisir, terkoordinasi dan terpadu.

II.6. Kelompok Sasaran Layanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah *leading sector* dalam penanggulangan bencana di daerah maka kelompok sasaran dari layanan BPBD adalah masyarakat di daerah rawan bencana, masyarakat yang terdampak bencana, Perangkat Daerah terkait bencana, Organisasi masyarakat pemerhati bencana, Perguruan tinggi, dunia usaha, relawan bencana dan gender. Semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD baik pra bencana, darurat bencana maupun pasca bencana di fokuskan pada kelompok sasaran ini.

Dalam melaksanakan tugasnya BPBD bekerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, antara lain : Polsek dan Koramil setempat, Pihak Kecamatan, Kelompok Relawan, DAMKAR, SAR, Aparat Desa setempat dan masyarakat daerah setempat.

II.7. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecenderungan potensi bencana adalah semakin meningkat, sehingga perlu penanganan yang tepat dan optimal. Penanganan penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun pelaksanaan di lapangan masih dijumpai kendala dan tantangan yang menjadi faktor penghambat, yaitu :

1. Belum memadainya kinerja aparat maupun kelembagaan penanggulangan bencana; dan
2. Masih rendahnya tingkat kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Tantangan dalam penanggulangan bencana dilihat dari segi kinerja aparat dan kelembagaan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Perlunya sosialisasi paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan sampai ke tingkat pemerintahan paling bawah;
2. Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana karena masih banyak jumlah penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana;
3. Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait;
4. Adanya ego sektoral dari perangkat daerah terkait di luar Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana;
5. Rencana operasi penanggulangan bencana tidak selalu sesuai dengan keadaan real di lapangan;
6. Belum optimalnya peran dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu koordinasi, komando dan pelaksana; dan

7. Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan penanggulangan bencana.

Peluang yang dapat dikembangkan sesuai dengan pengembangan Perangkat Daerah adalah :

1. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar, yang secara khusus menangani penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
3. Semakin sinerginya penanganan penanggulangan bencana yang merupakan tanggung jawab bersama pemerintah maupun non pemerintah;
4. Adanya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif;
5. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat mengurangi resiko bencana;
6. Dukungan kebijakan pusat dan sinkronisasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
7. Adanya peran serta dan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat dalam penanggulangan bencana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

BPBD Kabupaten Karanganyar dibentuk sebagai respon terhadap perubahan paradigma penanggulangan bencana yakni paradigma tanggap darurat ke paradigma pengurangan resiko bencana. Penanggulangan bencana tidak hanya dilaksanakan sebagai kegiatan tanggap darurat saat kejadian, tetapi harus dipahami dan dilaksanakan dengan memberi prioritas pada pengurangan risiko bencana. Oleh sebab itu penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan saat pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana menempatkan masyarakat sebagai subyek yang harus ditingkatkan kapasitasnya dalam menghadapi ancaman bencana.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kesekretariatan :

- a. Belum optimalnya komunikasi, koordinasi dan juga pembagian kerja sesuai dengan Jabatan Fungsionalnya;
- b. Belum optimalnya pengelolaan administrasi dan manajemen Perangkat Daerah (PD);
- c. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi;

- d. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah (PD) baik secara kualitas maupun kuantitas;

2. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- a. Masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dalam mitigasi bencana;
- b. Masih kecilnya persentase Desa tangguh bencana di Kabupaten Karanganyar;
- c. Belum Optimalnya Penguatan Kelembagaan Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana di Tingkat Kecamatan dan Desa;
- d. Belum Optimalnya kapasitas dan kompetensi Relawan dalam Penanggulangan Bencana;
- e. Belum Optimalnya peran relawan dalam Penanggulangan bencana;
- f. Belum Optimalnya jumlah Sarana Prasarana Sistem Peringatan Dini/ *Early Warning System* (EWS).

3. Kedaruratan dan Logistik

- a. Belum memadainya sarana prasarana Penanganan Darurat Bencana;
- b. Belum optimalnya pengelolaan logistik pada saat tanggap darurat bencana;
- c. Belum optimalnya Sinergitas Lintas Sektoral pada saat terjadi bencana.

4. Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

- a. Belum tersedianya hasil kajian kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana yang sesuai standar;
- b. Belum optimalnya Sinergitas Lintas Sektoral pada saat pasca bencana.

Tabel III-1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya penanganan bencana .	a. Belum Optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;	<p>a. Masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dalam Mitigasi Bencana;</p> <p>b. Masih kecilnya persentase Desa tangguh bencana di Kabupaten Karanganyar;</p> <p>c. Belum Optimalnya Penguatan Kelembagaan Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana di Tingkat Kecamatan dan Desa;</p> <p>d. Belum optimalnya peran relawan dalam penanggulangan bencana;</p> <p>e. Belum Optimalnya jumlah Sarana Prasarana Sistem Peringatan Dini/ <i>Early Warning System</i> (EWS);</p>
		b. Belum optimalnya penanganan kegawat daruratan dan logistik bencana;	<p>a. Belum Memadainya Sarana Prasarana Penanganan Darurat Bencana;</p> <p>b. Belum optimalnya pengelolaan logistik pada saat tanggap darurat bencana:</p>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			c. Belum optimalnya Sinergitas Lintas Sektoral pada saat terjadi bencana.
		c. Belum Optimalnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.	a. Belum tersedianya hasil kajian kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana yang sesuai standar; b. Belum optimalnya Sinergitas Lintas Sektoral pada saat pasca bencana.

III.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomer 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar tahun 2013 - 2032, ditetapkan rencana pola ruang wilayah Kabupaten. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri dari rencana pola ruang kawasan peruntukan lindung dan rencana polar uang peruntukan budidaya. Kawasan peruntukan lindung meliputi :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
2. Kawasan perlindungan setempat;
3. Kawasan konservasi;
4. Kawasan rawan bencana alam;
5. Kawasan lindung geologi; dan
6. Kawasan cagar budaya.

Dalam kawasan peruntukan lindung di dalamnya termasuk kebijakan pengelolaan kawasan rawan bencana alam. Kawasan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (d) meliputi :

kawasan rawan bencana gerakan tanah dan kawasan rawan bencana banjir.

Kawasan rawan bencana gerakan tanah meliputi :

1. Kecamatan Jenawi
2. Kecamatan Ngargoyoso
3. Kecamatan Tawangmangu
4. Kecamatan Jatiyoso
5. Kecamatan Jumapolo
6. Kecamatan Jumantono
7. Kecamatan Jatipuro
8. Kecamatan Karangpandan
9. Kecamatan Matesih
10. Kecamatan Karanganyar
11. Kecamatan Kerjo
12. Kecamatan Kebakkaramat
13. Kecamatan Gondangrejo
14. Kecamatan Mojogedang

Sedangkan kawasan rawan banjir merupakan Kawasan yang terdampak dari *backwater* Sungai Bengawan Solo, meliputi wilayah :

1. Kecamatan Jaten;
2. Kecamatan Kebakkramat; dan
3. Kecamatan Gondangrejo.

Dalam RTRW ditetapkan juga kawasan lindung geologi yang meliputi kawasan cagar alam geologi dan sempadan mata air. Kawasan lindung geologi berupa Kawasan cagar alam geologi, meliputi wilayah :

1. Situs Ngasinan/Watukandang di Kecamatan Matesih;
2. Situs Palanggatan di Kecamatan Ngargoyoso;
3. Situs Menggung di Kecamatan Tawangmangu;

Sedangkan sempadan mata air berupa kawasan dengan jarak 200 (dua ratus) meter sekeliling mata air seluas kurang lebih 336 (tiga ratus tiga puluh enam) hektar, terdapat di :

1. Kecamatan Tawangmangu;
2. Kecamatan Matesih;
3. Kecamatan Karangpandan;
4. Kecamatan Ngargoyoso;
5. Kecamatan Karanganyar;
6. Kecamatan Jumapolo;
7. Kecamatan Jatipuro;
8. Kecamatan Jatiyoso;
9. Kecamatan Gondangrejo;
10. Kecamatan Mojogedang;
11. Kecamatan Kebakkramat;
12. Kecamatan Jumantono.

Selain bencana alam tanah gerakan tanah dan banjir, Kabupaten Karanganyar juga berpotensi terjadi bencana angin puting beliung, kekeringan dan kebakaran lahan.

III.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu dengan melihat keberadaan kondisi BPBD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam 3 tahun kedepan (2024 – 2026).

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, digunakan metode SWOT analisis. Lingkungan internalnya yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*), sedangkan lingkungan eksternal meliputi peluang (*opportunitiy*) dan ancaman (*threaths*).

Isu-isu strategis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, diuraikan berdasarkan metode SWOT tersebut, sebagai berikut :

1. Strategi S – O
 - a. Adanya landasan hukum tentang pembentukan BPBD dan landasan hukum tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, dengan demikian diharapkan fungsi koordinator, komando dan pelaksana dapat berfungsi secara optimal dalam penanggulangan bencana.
 - b. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan penanggulangan yang berbasis masyarakat, baik tahap pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana.
2. Strategi W – O
 - a. Disusun Standar Operasi Prosedur (SOP) sebagai acuan pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi;
 - c. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana;
 - d. Peningkatan sarana prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. Pengelolaan dan pemutakhiran data dan informasi kebencanaan; dan
 - f. Penyediaan dana kontinjensi dengan dukungan kebijakan pemerintah pusat.
3. Strategi S – T
 - a. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait; dan
 - b. Sosialisasi pengurangan risiko bencana pada masyarakat di daerah rawan bencana.
4. Strategi W – T
 - a. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana; dan

- b. Keterpaduan penanganan penanggulangan bencana secara komprehensif dan sistematis dalam kebijakan pembangunan daerah.

Berdasarkan analisa SWOT tersebut maka isu strategis Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penguatan masyarakat terkait dengan kesiapsiagaan bencana hal ini dapat dilihat dari jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana masih sedikit.
2. Masih kurangnya kapasitas aparatur dan masyarakat tentang penanggulangan bencana.
3. Belum optimalnya upaya mitigasi bencana.
4. Belum optimalnya ketersediaan data bencana.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan Tahun 2024-2026 adalah **“Meningkatkan Daya Saing Daerah”**. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan, antara lain :

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan
3. Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
5. Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan.

IV.1. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 menjadi dasar penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Adapun Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

IV.1.1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar sesuai dengan sasaran Rencana Pembangunan Daerah dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi BPBD, yaitu :

- a. Meningkatkan wilayah Tangguh bencana berbasis lingkungan;
- b. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.

IV.1.2. Sasaran

Dalam mencapai tujuan strategis OPD, maka ditetapkan sasaran – sasaran yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan juga gambaran umum OPD (potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan isu strategis yang harus diatasi). Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan wilayah yang Tangguh bencana; dan
- b. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan.

Tujuan dan Sasaran tersebut untuk lebih lengkapnya akan disajikan dalam *cascading* yang memuat indikator kinerja, kondisi awal, target capaian dan kondisi akhir, sebagai berikut:

Tabel IV- 1 Cascading Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL (2023)	TARGET			KONDISI AKHIR
								2024	2025	2026	
I.	Meningkatkan wilayah Tangguh bencana berbasis lingkungan	Indeks Risiko Bencana			Berdasarkan Penilaian dari BNPB	indeks	90	82	81	80	80
			1. Meningkatkan wilayah yang Tangguh bencana	Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana	Jumlah desa/ kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan dikali 100%	%	10,73	22,03	25,98	31,07	31,07
II.	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi			Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	indeks	64	72	73	75	75
			2. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	NILAI SAKIP	Hasil Penilaian dari Inspektorat Daerah	SKOR	72	72,2	72,5	73	73

IV.2. POHON KINERJA DAERAH

Pohon kinerja daerah digambarkan dengan keterkaitan / pengaruh / akibat dari dilaksanakannya program yang tepat sasaran. Memang tidak semua program terkait langsung dengan sasaran daerah, sehingga ada program prioritas atau strategis dan program-program pendukung. Secara singkat pohon kinerja digambarkan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 4.1.
Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Program OPD
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Program Prioritas / Strategis OPD
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Sasaran 1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	
	Sasaran 2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	
	Sasaran 3 Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	
	Sasaran 4 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Sasaran 5 Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Program Penanggulangan Bencana

Sumber : BAPERLITBANG, 2023

IV.3. POHON KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pohon kinerja perangkat daerah menggambarkan bagaimana tujuan OPD dicapai melalui program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan. Tidak semua kegiatan dan subkegiatan berkaitan langsung

dengan pencapaian tujuan dan sasaran OPD, sehingga dalam sebagaimana disampaikan tabel berikut.

Tabel 4.2.
Keselarasn Tujuan dan Sasaran OPD dengan RPD
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Tujuan OPD	Indikator
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Sasaran 1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial		
	Sasaran 2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan		
	Sasaran 3 Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal		
	Sasaran 4 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
	Sasaran 5 Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Meningkatkan wilayah Tangguh bencana berbasis lingkungan	Indeks Risiko Bencana

Sumber : BAPERLITBANG, 2023

Tabel 4.3.
Keselarasan Sasaran RPD, Tujuan dan Sasaran OPD dan Program

Sasaran RPD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program
Sasaran 5 Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Meningkatkan wilayah Tangguh bencana berbasis lingkungan	1. Meningkatkan wilayah yang Tangguh bencana	Program Penanggulangan Bencana
		2. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : BAPERLITBANG, 2023

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V.1. STRATEGI

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Bab IV, strategi yang ditempuh oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan wilayah yang Tangguh bencana dan mengurangi risiko bencana dilakukan dengan meningkatkan kapasitas penduduk di desa-desa yang berada di daerah rawan bencana.
- b. Membangun sistem peringatan dini yang terkoneksi dengan provinsi dan pusat serta lembaga lainnya.
- c. Penyebaran informasi penanggulangan bencana secara periodik, cepat dan akurat.
- d. Melibatkan unsur pemuka masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. Mempercepat penyusunan regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- f. Memperkuat kinerja antar lembaga terkait.

V.2. KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan kebijakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah rawan.
- b. Standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- c. Pendataan daerah potensi bencana melalui peta rawan bencana.
- d. Prosedur tetap (Protap) penyelenggaraan kebutuhan dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
- f. Pembentukan dan pengembangan forum pengurangan risiko bencana.
- g. Pembentukan desa tangguh bencana.

Tabel V- 1 Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan wilayah Tangguh bencana berbasis lingkungan	Meningkatkan wilayah yang Tangguh bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan wilayah yang Tangguh bencana dan mengurangi risiko bencana dilakukan dengan meningkatkan kapasitas penduduk di desa-desa yang berada di daerah rawan bencana. b. Membangun sistem peringatan dini yang terkoneksi dengan provinsi dan pusat serta lembaga lainnya c. Penyebaran informasi penanggulangan bencana secara periodik, cepat dan akurat d. Melibatkan unsur pemuka masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. e. Mempercepat penyusunan regulasi penyelenggaraan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah rawan. b. Standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana. c. Pendataan daerah potensi bencana melalui peta rawan bencana d. Prosedur tetap (Protap) penyelenggaraan kebutuhan dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana. e. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat f. Pembentukan dan pengembangan forum pengurangan resiko bencana g. Pembentukan desa tangguh bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		penanggulangan bencana di daerah. f. Memperkuat kerjasama antar lembaga terkait.	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinir oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, BPBD Kabupaten Karanganyar menetapkan program-programnya sesuai Rencana Pembangunan Daerah periode 2024 – 2026.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang lebih terperinci, berisi aktivitas-aktivitas yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

BPBD Kabupaten Karanganyar dalam mencapai sasaran Rencana Pembangunan Daerah melakukan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program utama (teknis), program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam proses pra kejadian bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana.

Program utama BPBD Kabupaten Karanganyar adalah **Program Penanggulangan Bencana**, yang terdiri dari kegiatan :

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/kota;

- 2) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana).
- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
 - 2) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
 - 3) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota;
 - 4) Penyediaan Peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - 5) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - 6) Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
 - 7) Penyusunan Rencana Kontinjensi;
 - 8) Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
 - 9) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
 - 10) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam.
- c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas;
 - 2) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota;
 - 3) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
 - 4) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana Kabupaten/Kota;
 - 5) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
 - 6) Respon Cepat bencana Non Alam Epidemik/Wabah penyakit.
- d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
 - 2) Penguatan Kelembagaan bencana Kabupaten/ kota;
 - 3) Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana;
 - 4) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;
 - 5) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - 6) Bimbingan Teknis Pascabencana kabupaten/kota;
 - 7) Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota.
2. Program pendukung (generik), program ini merupakan program rutin yang digunakan oleh semua perangkat daerah. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua Perangkat Daerah), maka program tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peran dan kewenangan BPBD Kabupaten Karanganyar sebagai lembaga penanggulangan bencana. Program pendukung BPBD Kabupaten Karanganyar adalah Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, yang terdiri dari kegiatan :
- a. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya; dan

- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 - 8) Penataan Arsip Dinamis SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:;
- 1) Pengadaan Mebel;
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya; dan
 - 3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyediaan jasa surat menyurat; dan
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan Mebel;
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

Tingkat capaian kinerja program dan atau kegiatan digambarkan dalam indikator kinerja yaitu alat ukur spesifik, kuantitas atau kualitas

untuk masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator kinerja merupakan acuan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta dapat digunakan sebagai evaluasi baik tahap perencanaan, pelaksanaan ataupun pasca pelaksanaan.

Kelompok sasaran dalam melaksanakan program dan kegiatan BPBD meliputi masyarakat di daerah rawan bencana, Perangkat Daerah terkait bencana, Organisasi masyarakat pemerhati bencana, Perguruan tinggi, dunia usaha, relawan bencana dan gender.

Dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terlepas dari alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia. Perencanaan dan penganggaran yang terpadu, terintegrasi, konsisten dan mengikat, dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah. Pagu anggaran indikatif merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang perhitungannya berdasarkan standar satuan harga yang sudah ditetapkan. Perencanaan anggaran jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya dituangkan dalam prakiraan maju.

Tabel Rencana Program dan Pendanaan Indikatif BPBD Karanganyar Tahun 2024-2026 kami sajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel VI- 1 Rencana Program dan Penadanaan Indikatif BPBD Karanganyar Tahun 2024-2026

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)						TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA
									2024		2025		2026		Target	Rp.		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan Wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Indeks Risiko Bencana						Berdasarkan hasil penilaian dari BNPB	Indeks	82		81		80		80			BPBD
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi						Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	72		73		75		75			BPBD
		Meningkatkan wilayah yang tangguh bencana	Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana				Jumlah desa/ kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah seluruh desa/ kelurahan dikali 100%	%	22,03		25,98		31,07		31,07		Kab. Karang anyar	BPBD
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	NILAI SAKIP				Hasil Penilaian dari Inspektorat Daerah	Skor	72,2		72,5		73		73		Kab. Karang anyar	BPBD
				1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.258.250		6.575.050		6.858.613		19.691.913		BPBD
				1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			6.258.250		6.575.050		6.858.613		19.691.913		BPBD

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)						TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA	
												2024		2025		2026		Target	Rp.			
												Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PersentaseIndikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah Indikator sasaran dan pogram di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program kali 100%	%	85	3.479.500	86	3.503.800	87	3.633.800	87	10.617.100	Kab. Karang anyar	BPBD
				1	5	1	2	0	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	5.000	100	5.000	100	35.000	100	45.000	Kab. Karang anyar	BPBD
				1	5	1	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	0	0	0	0	1	30.000	1	30.000	Kab. Karang anyar	BPBD
				1	5	1	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	3	5.000	3	5.000	3	5.000	9	15.000	Kab. Karang anyar	BPBD

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)						TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA	
												2024		2025		2026		Target	Rp.			
												Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				1	5	1	2	0	Administrasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan BPBD	Terlaksananya Administrasi Keuangan BPBD	%	100	2.055.000	100	2.068.800	100	2.088.800	100	6.212.600	Kab. Karang anyar	BPBD
				1	5	1	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	19	2.050.000	19	2.063.800	19	2.083.800	57	6.197.600	Kab. Karang anyar	BPBD
				1	5	1	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	5.000	1	5.000	1	5.000	3	15.000	Kab. Karang anyar	BPBD
				1	5	1	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian BPBD	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian BPBD	%	100%	150.000	100	150.000	100	150.000	100	450.000	Kab. Karang anyar	BPBD
				1	5	1	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	65	50.000	65	50.000	65	50.000	195	150.000	Kab. Karang anyar	BPBD

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)						TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA	
												2024		2025		2026		Target	Rp.			
												Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				1	5	1	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	65	100.000	65	100.000	65	100.000	195	300.000	Kab. Karanganyar	BPBD
				1	5	1	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum BPBD	Terlaksananya Administrasi Umum BPBD	%	100	191.500	100	192.000	100	202.000	100	585.500	Kab. Karanganyar	BPBD
				1	5	1	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	10	10.000	10	10.000	10	10.000	30	30.000	Kab. Karanganyar	BPBD
				1	5	1	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	50	15.000	50	15.000	50	15.000	150	45.000	Kab. Karanganyar	BPBD
				1	5	1	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	20	11.000	20	11.000	20	11.000	60	33.000	Kab. Karanganyar	BPBD

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)						TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA
									2024		2025		2026		Target	Rp.		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				1.5.1.2.006.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	11	12.500	11	13.000	11	13.000	33	38.500	Kab. Karang anyar	BPBD
				1.5.1.2.006.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	2	3.000	2	3.000	2	3.000	6	9.000	Kab. Karang anyar	BPBD
				1.5.1.2.006.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	20	5.000	20	5.000	25	5.000	65	15.000	Kab. Karang anyar	BPBD
				1.5.1.2.006.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	250	130.000	250	130.000	250	140.000	750	400.000	Kab. Karang anyar	BPBD
				1.5.1.2.006.01	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	100	5.000	100	5.000	100	5.000	300	15.000	Kab. Karang anyar	BPBD

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)						TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA
												2024		2025		2026		Target	Rp.		
												Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				1	5	1	2 0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	680.000	100	680.000	100	730.000	100	2.090.000	Kab. Karang anyar	BPBD
				1	5	1	2 0 7	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	5	10.000	5	10.000	5	10.000	15	30.000	Kab. Karang anyar	BPBD
				1	5	1	2 0 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	5	20.000	5	20.000	5	20.000	15	60.000	Kab. Karang anyar	BPBD
				1	5	1	2 0 7	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	650.000	1	650.000	1	700.000	3	2.000.000	Kab. Karang anyar	BPBD
				1	5	1	2 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang BPBD	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang BPBD	%	100	93.000	100	93.000	100	103.000	100	289.000	Kab. Karang anyar	BPBD

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)						TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA
													2024		2025		2026		Target	Rp.		
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				1	5	1	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	250	3.000	250	3000	250	3000	750	9.000	Kab. Karang anyar	BPBD
				1	5	1	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	36	90.000	36	90.000	36	100.000	108	280.000	Kab. Karang anyar	BPBD
				1	5	1	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah BPBD	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah BPBD	%	100	305.000	100	315.000	100	325.000	100	945.000	Kab. Karang anyar	BPBD
				1	5	1	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	21	230.000	21	240.000	21	250.000	63	720.000	Kab. Karang anyar	BPBD
				1	5	1	2	0	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Jumlah Mebel yang dipelihara	unit	10	5.000	10	5.000	10	5.000	30	15.000	Kab. Karang anyar	BPBD

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)						TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA
														2024		2025		2026		Target	Rp.		
														Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				1	5	1	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	150	60.000	150	60.000	150	60.000	450	180.000	Kab. Karang anyar	BPBD	
				1	5	1	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	10.000	1	10.000	1	10.000	3	30.000	Kab. Karang anyar	BPBD	
				1	0	0			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi seluruh warga negara di kawasan rawan bencana dikali 100%	%	100	2.778.750	100	3.071.250	100	3.224.812,500	100	9.074.813	Kab. Karang anyar	BPBD	
									Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dibagi seluruh warga negara di kawasan rawan bencana dikali 100%	Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dibagi seluruh warga negara di kawasan rawan bencana dikali 100%	%	100		100		100		100		Kab. Karang anyar	BPBD	

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)						TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA	
												2024		2025		2026		Target	Rp.			
												Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
									Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	%	100		100		100		100		Kab. Karanganyar	BPBD	
				1	0	0	2		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan bencana	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan bencana	%	100	150.000	100	150.000	100	170.000	100	470.000	Kab. Karanganyar	BPBD
				1	0	0	2	0	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana	dokumen	0	0	0	0	1	5.000	1	5.000	Kab. Karanganyar	BPBD

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)						TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA
												2024		2025		2026		Target	Rp.		
												Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				100200	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	orang	1100	150.000	1100	150.000	1100	165.000	3300	465.000	Kab. Karanganyar	BPBD			
				100302	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana	Terlaksananya Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana	%	100	500.000	100	780.000	100	790.000	100	2.070.000	Kab. Karanganyar	BPBD			

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)						TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA
									2024		2025		2026		Target	Rp.		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				100200530026	Penguatan Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	kawasan	3	150.000	3	150.000	5	250.000	11	550.000	Kab. Karang anyar	BPBD
				100200530028	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	orang	50	30.000	50	30.000	50	50.000	150	110.000	Kab. Karang anyar	BPBD
				100200530029	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	dokumen	0	0	0	0	1	5.000	1	5.000	Kab. Karang anyar	BPBD
				100200530020	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	orang	500	100.000	500	100.000	500	125.000	1500	325.000	Kab. Karang anyar	BPBD
				100200530021	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	dokumen	0	0	1	200.000	0	0	1	200.000	Kab. Karang anyar	BPBD
				100200530022	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga	keluarga	25	40.000	25	40.000	30	50.000	80	130.000	Kab. Karang anyar	BPBD

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)						TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA
													2024		2025		2026		Target	Rp.		
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
									Tanggap Bencana Alam	Tanggap Bencana Alam												
				1	0	0	2	0	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	dokumen	0	0	0	0	1	5.000	1	5.000	Kab. Karang anyar	BPBD
				1	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	unit	10	25.000	10	25.000	10	25000	30	75.000	Kab. Karang anyar	BPBD
				1	0	0	2	0	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara yang termasuk kelompok rentan di Kawasan rawan bencana yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Warga Negara yang termasuk kelompok rentan di Kawasan rawan bencana yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	kawasan	5	150.000	7	230.000	8	275.000	20	655.000	Kab. Karang anyar	BPBD

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)						TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA
									2024		2025		2026		Target	Rp.		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				1002020	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana kabupaten/Kota	dokumen	1	5.000	1	5.000	1	5000	3	15.000	Kab. Karanganyar	BPBD
				100203	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban banecana	Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban banecana	%	100	1.933.750	100	1.946.250	100	2.039.812,500	100	5.919.813	Kab. Karanganyar	BPBD
				1002031	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah laporan Koordinasi respon cepat Kejadian Luar biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah laporan Koordinasi respon cepat Kejadian Luar biasa Penyakit/Wabah Prioritas	laporan	1	5.000	1	5.000	1	5.000	3	15.000	Kab. Karanganyar	BPBD
				1002032	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	SK Penetapan Status Darurat bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 jam berdasarkan hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	SK Penetapan Status Darurat bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 jam berdasarkan hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	dokumen	1	5.000	1	5.000	1	5.000	3	15.000	Kab. Karanganyar	BPBD

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)						TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA
									2024		2025		2026		Target	Rp.		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				10020330	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	orang	500	1.733.750	500	1.746.250	500	1.799.812,500	1500	5.279.813	Kab. Karanganyar	BPBD
				10030039	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	500	180.000	500	180.000	500	220.000	1500	580.000	Kab. Karanganyar	BPBD
				15320130	Respon Cepat bencana Non Alam Epidemik/Wabah penyakit	SK Penetapan Status Darurat bencana dan SSKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 jam berdasarkan hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	SK Penetapan Status Darurat bencana dan SSKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 jam berdasarkan hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	dokumen	1	5.000	1	5000	1	5000	3	15.000	Kab. Karanganyar	BPBD
				1003031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporan Pelaksanaan Aktivasi Komandi Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporan Pelaksanaan Aktivasi Komandi Penanganan Darurat Bencana	laporan	1	5.000	1	5000	1	5000	3	15.000	Kab. Karanganyar	BPBD

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)						TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA
												2024		2025		2026		Target	Rp.		
												Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				10034		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	100	195.000	100	195.000	100	225.000	100	615.000	Kab. Karanganyar	BPBD		
				10534	0041	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah	dokumen	1	5.000	1	5.000	1	5.000	3	15.000	Kab. Karanganyar	BPBD		
				10534	0042	Penguatan Kelembagaan bencana Kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	dokumen	1	5.000	1	5000	1	5000	3	15.000	Kab. Karanganyar	BPBD		
				10534	0043	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Terjalinnnya kerjasama dengan kelompok relawan (penyerahan hibah untuk kelompok relawan di Kab. Karanganyar)	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	dokumen	1	10.000	1	10.000	1	20.000	3	40.000	Kab. Karanganyar	BPBD		
				10534	0044	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaanya ng tersedia	dokumen	1	10.000	1	10.000	1	10.000	3	20.000	Kab. Karanganyar			

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)						TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA
									2024		2025		2026		Target	Rp.		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				1002045000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	laporan	1	15.000	1	15.000	2	30.000	4	60.000	Kab. Karanganyar	
				1002045000	Bimbingan Teknis Pascabencana kabupaten/kota	Jumlah Aparatur BPBD Provisni dan lintas daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Provisni dan lintas daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana (R3P)	orang	100	50.000	100	50.000	100	50.000	300	150.000	Kab. Karanganyar	

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	FORMULASI	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)						TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA		
									2024		2025		2026		Target	Rp.				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				1 0 0 2 0 0 4	0 5 3 .0 1 4	0 0 0 0 0 0	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektir sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektir sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kegiatan	1	100.000	1	100.000	1	100.000	3	300.000	Kab. Karanganyar	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar secara rinci tertuang dalam tabel VII-1 dan VII-2. Dalam tabel VII-1 terinci indikator kinerja utama Perangkat Daerah target capaian dalam 3 tahun kedepan dan kondisi akhir kinerja, sedangkan dalam tabel VII-2 terinci indikator kinerja program Perangkat Daerah, target capaian dalam 3 tahun kedepan dan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD. Uraian selengkapnya tentang penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2024-2026 di sajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel VII- 1 Indikator Kinerja Utama BPBD

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Target			Target Akhir Renstra
				2024	2025	2026	
1. Indeks Risiko Bencana		Berdasarkan hasil penilaian dari BNPB	indeks	82	81	80	80
2. Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	indeks	72	73	75	75
	1. Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Jumlah desa /kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan dikali 100%	%	22,03	25,98	31,07	31,07
	2. Nilai SAKIP	Hasil penilaian dari Inspektorat Daerah	Skor	72,2	72,5	73	73

Tabel VII- 2 Indikator Kinerja Program BPBD

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target			Target Akhir Renstra
			2024	2025	2026	
1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi seluruh warga negara di kawasan rawan bencana dikali 100%	%	100	100	100	100
2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dibagi seluruh warga negara di kawasan rawan bencana dikali 100%	%	100	100	100	100
3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	%	100	100	100	100

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026 adalah penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk mengisi kekosongan dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar yang telah selesai masa berlakunya sampai dengan dipilihnya Kepala Daerah yang baru. Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 adalah selama 3 (tiga) tahun, sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Karanganyar tahun 2024 - 2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada BPBD Kabupaten Karanganyar agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program serta kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada BPBD Kabupaten Karanganyar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Karanganyar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja BPBD Kabupaten Karanganyar wajib berpedoman pada Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra oosecara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

